

Laporan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2026
Sekretaris Deputy Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

A. Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2026

Sekretaris Deputy Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital memiliki 1 (satu) Sasaran Kegiatan dan 7 (tujuh) Indikator Kinerja Utama pada tahun 2026. Hasil pengukuran kinerja Triwulan II Tahun 2026 dapat ditampilkan pada Tabel 1 sebagai berikut:

Tabel 1. Ringkasan Capaian Kinerja Sekretaris Deputy Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital Triwulan II Tahun 2026

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Tahun 2026	Target Triwulan II 2026	Realisasi Triwulan II	Realisasi Tahunan	Capaian Triwulan II (%)
I	Sasaran Kegiatan 1. Terwujudnya Tata Kelola Deputy Bidang Perniagaan dan Ekonomi Digital yang Baik						
1.1	Indikator 1.1 Tingkat Implementasi Reformasi Birokrasi Deputy Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital	Persentase	100%	30%	30%	30%	100%
1.2	Indikator 1.2 Tingkat Implementasi Tata Kelola Deputy Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital	Persentase	100%	40%	40%	40%	100%
1.3	Indikator 1.3 Tingkat Efektivitas Perencanaan Deputy Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital	Persentase	100%	70%	70%	70%	100%
1.4	Indikator 1.4 Tingkat Ketaatan Pelaporan Deputy Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital	Persentase	100%	50%	50%	50%	100%
1.5	Indikator 1.5 Persentase Penyelesaian Isu Strategis yang Diberikan oleh Deputy	Persentase	100%	50%	50%	50%	100%
1.6	Indikator 1.6 Persentase Pembangunan Zona Integritas Deputy Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital	Persentase	87%	-	101,93%*	101,93%*	110%*
1.7	Indikator 1.7 Indeks Kepuasan Layanan Sekretaris Deputy Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital	Indeks	3 dari 4	3 dari 4	3,33	3,33	110%

**) Nilai capaian merupakan nilai tahun 2025, mempertimbangkan penilaian Zona Integritas Tahun 2026 masih dalam proses penyusunan laporan oleh Inspektorat, walaupun pengisian LKE sudah dilaksanakan di Triwulan II ini.*

Kinerja Sekretaris Deputy Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital pada Triwulan II Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam ringkasan Tabel 1 dapat diuraikan sebagai berikut:

1	Sasaran Kegiatan: Terwujudnya Tata Kelola Deputy Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital yang Baik
----------	--

Pencapaian Sasaran Kegiatan: Terwujudnya Tata Kelola Deputy Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital ditunjukkan oleh pencapaian tujuh indikator kinerja yaitu:

- 1.1. Tingkat Implementasi Reformasi Birokrasi Deputy Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital
- 1.2. Tingkat Implementasi Tata Kelola Deputy Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital
- 1.3. Tingkat Efektivitas Perencanaan Deputy Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital
- 1.4. Tingkat Ketaatan Pelaporan Deputy Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital
- 1.5. Persentase Penyelesaian Isu Strategis yang Diberikan oleh Deputy
- 1.6. Persentase Pembangunan Zona Integritas Deputy Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital
- 1.7. Indeks Kepuasan Layanan Sekretaris Deputy Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital

Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

**1.1. Tingkat
Implementasi
Reformasi Birokrasi
Deputy Bidang
Koordinasi
Perniagaan dan
Ekonomi Digital**

Latar Belakang

Tingkat Implementasi Reformasi Birokrasi Deputy Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital merupakan ukuran yang menggambarkan sejauh mana unit kerja mampu mengimplementasikan Reformasi Birokrasi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Pada prakteknya, implementasi Reformasi Birokrasi diukur dengan pemenuhan bukti dukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Kedeputan. Adapun dokumen data dukung yang dinilai mampu menggambarkan implementasi Reformasi Birokrasi yang baik harus memenuhi 2 (dua) aspek utama, yaitu (1) ketepatan waktu penyampaian laporan berdasarkan periode laporan tertentu (Triwulan II, III, IV dan V) dan tanggal penyampaian dokumen tersebut kepada unit pengampu (tertera pada ND yang diedarkan unit pengampu), (2) substansi laporan telah sesuai dengan standar atau format yang ditentukan oleh unit pengampu.

Ruang lingkup bukti dukung Implementasi semua kegiatan Reformasi Birokrasi General dan Reformasi Birokrasi Tematik mengacu pada Peraturan Menteri PANRB tentang Roadmap Reformasi Birokrasi 2025 dan Peraturan Menteri PANRB tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi, serta Peraturan turunannya di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Adapun waktu penyampaian dokumen/laporan disesuaikan dengan Nota Dinas yang dikeluarkan oleh Kepala Biro yang menangani Reformasi Birokrasi.

Tingkat Implementasi Reformasi Birokrasi Deputy Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital dihitung berdasarkan seberapa banyak bukti dukung RB General dan RB Tematik yang dihasilkan sesuai standar di lingkungan Deputy Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital dibandingkan dengan jumlah keseluruhan bukti dukung yang telah dihasilkan. Berikut merupakan formulasi dalam menentukan Tingkat Implementasi Reformasi Birokrasi Deputy Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital:

$$\text{Tingkat implementasi RB} = \frac{\text{Total Bukti Dukung RB yang dihasilkan sesuai standar}}{\text{Total Bukti Dukung RB yang dihasilkan}} \times 100\%$$

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja IKU 1.1 Tingkat Implementasi Reformasi Birokrasi Deputy Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital Tahun 2026 adalah sebesar 100%. Penetapan target tahun 2026 mempertimbangkan dokumen output (bukti dukung) yang dihasilkan setiap indikator yang dalam lingkup koordinasi Sekretariat Deputy yang selanjutnya ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Sekretaris Deputy Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital Tahun 2026. Target tersebut ditetapkan sebagai komitmen Unit Kerja untuk mendukung pencapaian implementasi Reformasi Birokrasi pada tingkat Kementerian. Unit kerja berkomitmen untuk memenuhi seluruh data dukung implementasi Reformasi Birokrasi yang memenuhi standar substansi dan standar ketepatan waktu.

Adapun target Triwulan II 2026 adalah sebesar 30% dengan target capaian telah

tersusunnya beberapa dokumen dengan output: (i)Nota Dinas usulan Rancangan Renstra Kemenko Perekonomian; (ii) Pemberitahuan Optimalisasi Penggunaan Akun SRIKANDI; (iii) Laporan Realisasi Anggaran; (iv) Pengusulan Agen Perubahan; dan (v) Laporan Kinerja Triwulan II Tahun 2026.

Realisasi Tingkat Implementasi Reformasi Birokrasi Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital Triwulan II 2026 sebesar 30% dan tahunan berhasil tercapai sebesar 30% yang dihitung berdasarkan target total bukti dukung Implementasi Reformasi Birokrasi sesuai standar sebanyak 13 dokumen, dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target TW II 2026	Realisasi TW II 2026	Realisasi Tahunan	% Kinerja
IKU 1.1. Tingkat Implementasi Reformasi Birokrasi Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital	Persentase	30%	30%	30%	100% (memuaskan)

*) Realisasi Tahunan merupakan kumulatif realisasi pada Triwulan I, II Tahun 2026

Dokumen bukti dukung Reformasi Birokrasi yang telah dihasilkan sesuai standar sampai dengan Triwulan II tahun 2026 antara lain:

1. Dokumen Penyusunan dan Penetapan Tim Kerja (21 Dokumen)
2. Dokumen Kertas Kerja Penilaian Mandiri SPIP (1 Dokumen)
3. Dokumen Revisi Renja 2026 (1 Dokumen)
4. Dokumen Rekap Dalam Pengelolaan Srikandi (3 Dokumen)
5. Dokumen Laporan Realisasi Anggaran (3 Dokumen)
6. Dokumen Hasil Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemantauan SP4N-LAPOR! (1 Dokumen)
7. Dokumen Laporan Kinerja Triwulan (1 Dokumen)
8. Dokumen Hasil Rekomendasi BPK (1 Dokumen)
9. Dokumen Usulan Data Responden Internal dan Eksternal (1 Dokumen)
10. Dokumen Agen Perubahan (1 Dokumen)

Rincian lebih lanjut dapat diakses pada tautan berikut:
<https://drive.google.com/drive/folders/1ZI84dYhueOTsfv3LTb7-lwgog1yAVnKq?usp=sharing>

Pelaksanaan Rencana Aksi TW II dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi Triwulan II tahun 2026 sebagai berikut:

1.1. Tingkat Implementasi Reformasi Birokrasi Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital			
No	Rencana Aksi TW II	Status	Keterangan

1	Tingkat Capaian Kebijakan Sistem Kerja Baru dan Fleksibilitas Bekerja Pegawai (Dok. Penyusunan dan Penetapan Tim Kerja)	Terlaksana	Sebagai implementasi rencana aksi Tingkat Capaian Kebijakan Sistem Kerja Baru dan Fleksibilitas Bekerja Pegawai (Dokumen Penyusunan dan Penetapan Tim Kerja), Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital telah menerbitkan 12 Surat Keputusan Tim Kerja dan 17 Surat Keputusan Kelompok Kerja (Pokja). Penerbitan SK tersebut menjadi dasar pelaksanaan sistem kerja baru yang menegaskan pembagian tugas, peran, dan mekanisme koordinasi antarunit kerja, sehingga mendukung terwujudnya tata kelola organisasi yang lebih adaptif, kolaboratif, efektif, dan berorientasi pada pencapaian kinerja organisasi.
2	Tingkat Maturitas SPIP (Dokumen Kertas Kerja Penilaian Mandiri SPIP)	Terlaksana	Tingkat Maturitas SPIP Triwulan II Tahun 2026 terlaksana melalui: - Nota Dinas Biro MKKS No.PW.06.05/128/SET.M.EKON.1/04/2026 tanggal 28 April 2026, Deputi III telah menindaklanjuti mengirimkan ND Balasan No. PW.06.05/229/D.III.M.EKON.1/05/2026 tanggal 7 Mei 2026 hal Usulan Conterpart Penilaian Mandiri SPIP Tahun 2026. - Dialog Kinerja Penyusunan Form SPIP pada tanggal 8 Mei 2026 sesuai Surat Undangan Sesdep No.PW.06.05/269/D.III.M.EKON.1/06/2026 tanggal 5 Juni 2026. - ND Laporan Coaching Clinic Pengisian Kertas Kerja Penilaian Mandiri Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Tahun 2026 sesuai ND No.PW.06.05/8/D.III.M.EKON.1.1/05/2026 tanggal 20 Mei 2026. - ND Penyampaian Penilaian Mandiri SPIP dari Sesdep ke MKKS sesuai ND No. PW.06.05/276/D.III.M.EKON.1/06/2026 tanggal; 10 Juni 2026, berdasarkan ND Permintaan MKKS No. PW.06.05/143/SET.M.EKON.1/05/2026 tanggal 20 Mei 2026.
3	Indeks Perencanaan Pembangunan (Revisi Renja 2026)	Terlaksana	Indeks Perencanaan Pembangunan terlaksana berdasarkan ND Biro MKKS No. PR.02.02/11/SET.M.EKON.1/01/2026 tanggal 8 Januari 2026 hal Penyusunan Rancangan Awal Renja

			K/L TA 2027
4	Tingkat Digitalisasi Arsip (Rekap Dokumen dalam Srikandi)	Terlaksana	Tingkat Digitalisasi Arsip Triwulan II ini terlaksana berdasarkan: - ND Sesdep TU.04/6/D.III.M.EKON.1.4/05/2026 tanggal 18 Mei 2026 hal Laporan Menghadiri BimbinganTeknis Pengelolaan Arsip Dinamis 2026. - ND Sesdep ke Asdep No. TU.04/249/D.III.M.EKON.1/05/2026 tanggal 20 Mei 2026 hal Hasil Evaluasi Keaktifan User Aplikasi SRIKANDI.
5	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	Terlaksana	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Triwulan II terlaksana melalui: - Surat Kepala Biro Umum dan SDM No.B/KU.01/269/SET.M.EKON.4/04/2026 tanggal 2 April 2026 hal Laporan Realisasi Anggaran per 31 Maret 2026. - Undangan Rapat Kepala Biro Umum dan SDM No. PR.02.01/42/SET.M.EKON.1/04/2026 tanggal 13 April 2026 hal Pembahasan Kebijakan Penajaman Anggaran TA 2026. - Undangan Dialog Kinerja Setdep sesuai Surat Undangan No. PW.03.03/175/D.III.M.EKON.1/04/2026 tanggal 14 April 2026. - Surat Realisasi Anggaran No. PW.03.03/175/D.III.M.EKON.1/04/2026 tanggal 6 Mei 2026 hal Laporan Realisasi Anggaran per 30 April 2026. - Surat Undangan Setdep No. PR.02.01/267/D.III.M.EKON.1/06/2026 tanggal 3 Juni 2026 hal Undangan Dialog Kinerja Penyusunan Pagu Indikatif Tahun Anggaran 2027. - Laporan Realisasi Anggaran No. B/KU.01/410/SET.M.EKON.4/06/2026 tanggal 4 Juni 2026 hal Laporan Realisasi Anggaran per 31 Mei 2026.
6	Tingkat tindak lanjut pengaduan masyarakat melalui Layanan Aspirasi	Terlaksana	Tindak lanjut pengaduan masyarakat melalui SPAN-LAPOR berdasarkan dokumen Laporan Tahunan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan

	dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!)		Publik melalui SP4N-LAPOR! Tahun 2025.
7	Capaian IKU (Laporan Kinerja Triwulanan)	Terlaksana	Laporan Kinerja Triwulanan telah terlaksana berdasarkan ND Biro MKKS No. AK.03.01/170/SET.M.EKON.1/06/2026 tanggal 18 Juni 2026 hal Permintaan Penyusunan Narasi Kinerja Triwulan I dan II T.A. 2026, telah disampaikan ND dari Setdep ke Asdep No. AK.03.01/310/D.III.M.EKON.1/06/2026 tanggal 23 Juni 2026 hal Penyusunan Narasi Kinerja Triwulan I-II T.A. 2026
8	Tindak Lanjut Rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) (Capaian Akuntabilitas Keuangan)	Terlaksana	Pemenuhan dokumen pendukung pemeriksaan keuangan BPK dilaksanakan melalui Inspektorat Kemenko Perekonomian.
9	Survei Penilaian Integritas (SPI)	Terlaksana	Penyampaian usulan data responden internal dan eksternal SPI sudah dilakukan melalui Inspektorat Kemenko Perekonomian.
10	Indeks BerAKHLAK (Agen Perubahan)	Terlaksana	Penyampaian usulan kandidat Agen Perubahan Deputy Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital telah terlaksana melalui ND Setdep No. OT.05.01/193/D.III.M.EKON.1/10/6/2025 tanggal 12 Juni 2025.

Selain itu, upaya lainnya untuk menunjang IKU ini Sekretariat Deputy III telah berpartisipasi dalam kegiatan:

1. Menindaklanjuti ND Biro Hukum dan Organisasi No. RB.02/120/SET.M.EKON.2/05/2026 tanggal 11 Mei 2026 hal Penyampaian Hasil Monitoring dan Evaluasi Rencana Tindak Agen Perubahan Tahun 2026.
2. Laporan Pelaksanaan Rencana Tindak Agen Perubahan Triwulan I Tahun 2026 oleh Agen Perubahan tanggal 16 April 2026.
3. Pelaksanaan Mini Mentoring Pegawai oleh Agen Perubahan Deputy III yang telah dilaksanakan pada tanggal 8 Juni 2026 di Ruang Rapat Biro Umum 1 Lt.6 Gedung Pos Ibukota yang dihadiri oleh Pegawai di Lingkungan Deputy III dan turut mengundang Inspektur dan Biro Hukum Organisasi, sesuai Surat Undangan No. RB.02/268/D.III.M.EKON.1/06/2026 tanggal 4 Juni 2026.

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang Triwulan II Tahun 2025 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya diantaranya pemanfaatan teknologi untuk pelaksanaan rapat koordinasi melalui *video conference*, rapat koordinasi secara hybrid menggunakan fasilitas kantor. Jumlah efisiensi dari pengadaan rapat koordinasi melalui video conference tersebut diperkirakan mencapai Rp102.750.000 melalui penghematan biaya paket meeting di hotel. Hasil efisiensi tersebut dapat dialokasikan untuk kegiatan lain mendukung implementasi RB di Deputy III pada triwulan selanjutnya.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan II Tahun 2026, terdapat beberapa kendala atau hambatan

yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Berikut ini beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut:

1. Proses penyempurnaan dokumen kinerja masih memerlukan penyesuaian terhadap dinamika kebijakan dan kebutuhan evaluasi dari unit kerja pembina, sehingga beberapa dokumen memerlukan revidi dan penyesuaian secara berulang.
2. Pemanfaatan hasil monitoring dan evaluasi sebagai dasar penyempurnaan kinerja pada masing-masing unit kerja belum sepenuhnya optimal, sehingga tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan masih perlu dipercepat dan lebih terintegrasi.

Berdasarkan kendala-kendala dan capaian kinerja Triwulan II Tahun 2025, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan pada periode selanjutnya agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai:

1. Melaksanakan revidi berkala terhadap dokumen perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja untuk memastikan kesesuaian dengan ketentuan terbaru serta meningkatkan kualitas substansi dokumen yang disampaikan.
2. Memperkuat mekanisme monitoring dan evaluasi melalui penyampaian umpan balik (*feedback*) kepada unit kerja, percepatan tindak lanjut atas hasil revidi, serta peningkatan koordinasi dalam penyusunan rencana aksi perbaikan sehingga proses peningkatan akuntabilitas kinerja dapat berlangsung secara berkelanjutan, salah satunya melalui Dialog Kinerja sesuai Surat Undangan Sekretaris Deputi III No. PW.04.05/245/D.III.M.EKON.1/04/2026 tanggal 9 April 2026.

1.2.

Tingkat Implementasi Tata Kelola Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital

Latar Belakang

Tata kelola yang baik merupakan landasan penting bagi organisasi untuk mencapai visi, misi dan tujuan yang diemban. Ketercapaian Sasaran Kegiatan ini akan secara signifikan mendorong terwujudnya pelaksanaan proses bisnis Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital yang berfokus pada koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan yang efektif. Dengan tata kelola yang baik, organisasi dapat mewujudkan birokrasi yang efisien, transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Tingkat Implementasi Tata Kelola Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital merupakan ukuran yang menggambarkan sejauh mana unit kerja mampu mengimplementasikan tata kelola sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Pada prakteknya, implementasi tata kelola diukur dengan dengan pemenuhan bukti dukung pelaksanaan tata kelola di lingkungan Kedeputian. Adapun dokumen data dukung yang dinilai mampu menggambarkan implementasi tata kelola yang baik harus memenuhi 2 (dua) aspek utama, yaitu (1) ketepatan waktu penyampaian laporan berdasarkan periode laporan tertentu (Triwulan III, II, I dan IV) dan tanggal penyampaian dokumen tersebut kepada unit pengampu (tertera pada ND yang diedarkan unit pengampu), (2) substansi laporan telah sesuai dengan standar atau format yang ditentukan oleh unit pengampu.

Ruang lingkup Implementasi tata kelola diukur dari data dukung dokumen tata kelola meliputi dokumen keuangan, sistem pengendalian internal, data dan informasi, organisasi, tata laksana dan SDM, BMN, kearsipan, humas, protokol, persidangan, naskah pimpinan, hukum, dan SOP. Adapun waktu dan format akan diatur lebih lanjut melalui Nota Dinas Kepala Biro yang akan mengampuh dokumen dimaksud.

Tingkat Implementasi Tata Kelola Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital dihitung berdasarkan seberapa banyak bukti dukung Tata Kelola yang dihasilkan sesuai standar di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital dibandingkan dengan jumlah keseluruhan bukti dukung yang telah dihasilkan. Berikut merupakan formulasi dalam menentukan Tingkat Implementasi Tata Kelola Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi

Digital:

$$\text{Tingkat Implementasi Tata Kelola} = \frac{\text{Total Bukti Dukung Tata Kelola yang dihasilkan sesuai standar}}{\text{Total Bukti Dukung Tata Kelola yang dihasilkan}} \times 100\%$$

Berdasarkan Peraturan Menteri Perekonomian Nomor 15 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, sebagaimana tercantum dalam Pasal 90, Sekretaris Deputi melaksanakan tugas koordinasi, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program kegiatan, tata Kelola, dan dukungan administrasi di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital.

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja IKU 1.2 Tingkat Implementasi Tata Kelola Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital Tahun 2026 adalah sebesar 100%. Target tersebut dihitung berdasarkan total bukti dukung Tata Kelola yang dihasilkan sesuai standar dibagi dengan total bukti dukung yang seharusnya dihasilkan pada rentang waktu tertentu.

Adapun target Triwulan II 2026 adalah sebesar 40% dengan beberapa output, berupa: (i) Dokumen keuangan; (ii) Sistem Pengendalian Intern; (iii) Tata Laksana dan Sumber Daya Manusia; (iv) Pengelolaan Data dan Informasi; dan (v) Naskah Pimpinan.

Realisasi Tingkat Implementasi Tata Kelola Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital Triwulan II 2026 sebesar 40% dan tahunan juga berhasil tercapai sebesar 40% yang dihitung berdasarkan target total bukti dukung Implementasi Tata Kelola yang dihasilkan pada tahun 2026 sesuai standar sebanyak 18 dokumen, dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target TW II 2026	Realisasi TW II	Realisasi Tahunan*	% Kinerja
IKU 1.2. Tingkat Implementasi Tata Kelola Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital	Persentase	40%	40%	40%	100% (Memuaskan)

*) Realisasi Tahunan merupakan kumulatif realisasi pada Triwulan II, II Tahun 2026

Dokumen bukti dukung Tingkat Implementasi Tata Kelola Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital yang telah dihasilkan sesuai standar pada Triwulan II tahun 2026 antara lain:

1. Keuangan (7 Dokumen)
2. Sistem Pengendalian Intern (8 Dokumen)
3. Tata Laksana dan SDM (1 Dokumen)
4. Pengelolaan Data dan Informasi (1 Dokumen)
5. Naskah Pimpinan (1 Dokumen)

Rincian lebih lanjut dapat diakses pada tautan berikut:
<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1xswFgqlmHRn5KRKd-Qj83m21fiaEnr53/edit?usp=sharing&ouid=113263907645255775426&rtpof=true&sd=true>.

Pelaksanaan Rencana Aksi TW II dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi Triwulan II tahun 2026 dengan rincian sebagai berikut:

1.2. Tingkat Implementasi Tata Kelola Deputy Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital			
No	Rencana Aksi TW II	Status	Keterangan
1	Penyusunan dokumen keuangan	Terlaksana	Penyusunan dokumen keuangan pada Triwulan II telah terlaksana melalui hal berikut: - Laporan Realisasi Anggaran per 31 Maret 2026 sesuai ND Biro Umum dan Sumber Daya Manusia No. B/KU.01/269/SET.M.EKON.4/04/2026 tanggal 2 April 2026. - Menghadiri Rapat Pembahasan Kebijakan Penajaman Anggaran T.A. 2026 tanggal 13 April 2026 berdasarkan Surat Undangan Biro MKKS No. PR.02.01/42/SET.M.EKON.1/04/2026 tanggal 10 April 2026. - Melaksanakan Dialog Kinerja Internal Deputy III pada tanggal 17 April 2026 berdasarkan Surat Undangan No. PW.03.03/175/D.III.M.EKON.1/04/2026 tanggal 14 April 2026. - Laporan Realisasi Anggaran per 30 April 2026 berdasarkan Surat Biro Umum dan Sumber Daya Manusia No. B/KU.01/368/SET.M.EKON.4/05/2026 tanggal 6 Mei 2026. - Berdasarkan ND Biro MKKS No. PR.02.01/168/SET.M.EKON.1/06/2026 tanggal 22 Juni 2026 hal Permintaan Penyusunan Usulan Anggaran Belanja Tambahan TA. 2027, Deputy III menyampaikan ND Sekretariat Deputy III ke Plt Kepala Biro MKKS No. PR.02.01/317/D.III.M.EKON.1/06/2026 tanggal 23 Juni 2026 hal Penyampaian Usulan Anggaran Belanja Tambahan TA. 2027 - Laporan Realisasi Anggaran per 30 Mei 2026 berdasarkan Surat Biro Umum dan Sumber Daya

			Manusia No. B/KU.01/410/SET.M.EKON.4/06/2026 tanggal 4 Juni 2026. - Permohonan Masukan Behan Rapat Kerja Menko Perekonomian bersama Badan Anggaran DPR RI terkait Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-K/L) TA.2027.
2	Sistem Pengendalian Intern	Terlaksana	Sistem Pengendalian Intern pada Triwulan II telah terlaksana melalui beberapa dokumentasi kegiatan sebagai berikut: - Berdasarkan ND Kepala Biro MKKS No. PW.06.05/128/D.III.M.EKON.1/04/2026 tanggal 28 April 2026, Deputi III telah menyampaikan Usulan Conterpart Penilaian Mandiri SPIP Tahun 2026 melalui ND No. PW.06.05/229/D.III.M.EKON.1/05/2026 tanggal 7 Mei 2026. - Deputi III telah menyelenggarakan Dialog Kinerja Internal dalam rangka Penyusunan Form Sistem Pengendalian Intern pada tanggal 8 Mei 2026 sesuai Surat Undangan No. PW.06.05/269/D.III.M.EKON.1/06/2026 tanggal 5 Juni 2026. - Menghadiri kegiatan Direktorat Pengawasan Bidang Ekonomi dan Keuangan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPK dengan tema “Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi 2026 – Dari Kepatihan Administrasi Menuju Instrumen Strategis Pencapaian Kinerja”. - Pengisian Kertas Kerja Penilaian Maturitas SPIP Terintegrasi pada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, - Laporan Coaching Clinic Pengisian Kertas Kerja Penilaian Mandiri SPIP Tahun 2026 berdasarkan ND No. PW.06.05/8/D.III.M.EKON.1.1/05/2026 tanggal 20 Mei 2026.

			- Pelaksanaan Penilaian Mandiri SPIP di Lingkungan Kemenko Perekonomian berdasarkan ND Biro MKKS No. PW.06.05/143/SET.M.EKON.1/05/2026 tanggal 20 Mei 2026. - Deputi III telah menyampaikan Hasil Penilaian Mandiri (PM) SPIP di Lingkungan Deputi III melalui ND No. PW.06.05/276/D.III.M.EKON.1/06/2026 tanggal 10 Juni 2026.
3	Tata Laksana dan Sumber Daya Manusia	Terlaksana	Renaksi Tata Laksana dan Sumber Daya Manusia pada Triwulan II telah terlaksana melalui beberapa dokumentasi kegiatan sebagai berikut: - Keputusan Menko Perekonomian No. 75 Tahun 2026 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil. - Disposisi Deputi No. 536 tanggal 2 april 2026 hal Invitation of Seminar the China-Indonesia Two Countries Twin Parks, yang telah ditindaklanjuti melalui Surat Deputi No. PED.02.02/39/D.III.M.EKON/04/2025 tanggal 7 April 2026 hal Penawaran Peserta Training Seminar on The China-Indonesia "Two Countries, Twin "Parks" Cooperation. - Pelaksanaan Tugas Kedinasan untuk Mendukung Percepatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan berdasarkan ND Sesmenko Perekonomian No. KP.14/55/SES.M.EKON/04/2026. - Penyampaian Peserta Uji Kompetensi Jabatan Fungsional APK APBN dan PK APBN Periode I Tahun 2026. - Penyusunan Sasaran Kinerja di Lingkungan Kemenko Perekonomian berdasarkan ND Kepala Biro Umum dan SDM No. KP.08/271/SET.M.EKON.4/04/2026 tanggal 22 April 2026. - Melaksanakan tugas dalam rangka menghadiri kegiatan

			Talkshow "Midlife & Mid-Career Renewal: Menemukan Kembali Makna dalam Kehidupan dan Pekerjaan" pada tanggal 23 April 2026 sesuai Surat Tugas Kepala Biro Umum dan SDM No. KP.07.06/265/SET.M.EKON.4/04/2026 tanggal 16 April 2026. - Permohonan Persetujuan Staf Mengikuti Seleksi Terbuka dan Kompetitif Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama sesuai ND Asisten Deputi Perdagangan Dalam Negeri, Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga No. KP.35/D.III.M.EKON.3/04/2026 tanggal 27 April 2026 yang ditindaklanjuti melalui Disposisi Deputi No. 1222 tanggal 27 April 2026. - Usulan Kenaikan Pangkat Pegawai Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital Periode 1 Juni 2026 dan Konversi Predikat Kinerja ke Angka Kredit sesuai Surat No. 271/KEP/1020/SK/PAK/2026 a.n. Suparjo, S.AP., M.AP. - Penyampaian Informasi Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan Tahun 2026 sesuai ND Biro Umum dan SDM No. KP.07.01/333/SET.M.EKON.4/05/2026 tanggal 7 Mei 2026. - Permohonan Usulan ASN untuk Mengikuti Latsarmil Komcad Gelombang II sesuai ND Setdep No. KP.07.06/242/D.III.M.EKON.1/05/2026 tanggal 8 Mei 2026. - Penyampaian Usulan Permohonan Peninjauan Masa Kerja Pegawai Negeri Sipil Periode Mei 2026 sesuai ND Setdep No. KP.04.04/263/D.III.M.EKON.1/06/2026 tanggal 2 Juni 2026. - Permohonan Pengikutsertaan Peserta Diklat Khusus Analisis Kebijakan Batch 1 Tahun 2026 sesuai ND Setdep No.
--	--	--	--

			KP.07.06/264/D.III.M.EKON.1/06/2026 tanggal 3 Juni 2026.
4	Pengelolaan Data dan Informasi	Terlaksana	Pengelolaan Data dan Informasi pada Triwulan II telah terlaksana melalui penyampaian beberapa kegiatan dan seputar informasi isu strategis di lingkungan Deputy Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital melalui website resmi Kemenko Perekonomian https://www.ekon.go.id/ dan media sosial Deputy III @niaga_ekodig.
5	Naskah Pimpinan	Terlaksana	Renaksi naskah pimpinan periode triwulan I ini terlaksana melalui penerbitan naskah pimpinan pada Apel Pagi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada jadwal petugas apel Deputy III pada tanggal 23 Februari 2026 sesuai Surat Undangan No. TU.05.02/108/SET.M.EKON.4/04/2026 tanggal 16 April 2026.

Selain itu, upaya lainnya untuk menunjang IKU ini Sekretariat Deputy III telah berpartisipasi dalam kegiatan:

1. Melakukan Penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) Tahun 2026 di Lingkungan unit kerja Deputy Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital berdasarkan ND Biro Umum dan SDM No. KP.08/271/SET.M.EKON.4/04/2026 tanggal 22 April 2026.
2. Mengunggah SKP Target Tahun 2026 dan Penilaian Kinerja Periodik (Triwulan I-II) melalui tautan <https://tinyurl.com/PPK-2026>.
3. Melakukan Optimalisasi Kepatuhan Penggunaan Presensi/Absen ASN di lingkungan Deputy Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital sesuai ND Biro Umum dan SDM No. KP.14/377.A/SET.M.EKON.4/05/2026.
4. Menyampaikan Revisi Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Bulan April 2026 berdasarkan ND Setdep ke Biro MKKS No. PR.04.01/214/D.III.M.EKON.1/04/2026 tanggal 28 April 2026.
5. Menyampaikan Revisi Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Bulan Mei 2026 berdasarkan ND Setdep ke Biro MKKS No. PR.04.01/262/D.III.M.EKON.1/06/2026 tanggal 2 Juni 2026.

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang Triwulan II tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya, seperti menggunakan dokumen digital dan memanfaatkan aplikasi SRIKANDI dalam melakukan persuratan, rapat koordinasi melalui *video conference*, rapat koordinasi secara hybrid menggunakan fasilitas kantor. Jumlah efisiensi dari pengadaan rapat koordinasi melalui video conference tersebut diperkirakan mencapai Rp41.400.000 melalui penghematan biaya paket meeting di hotel. Hasil efisiensi tersebut dapat dialokasikan untuk kegiatan lain mendukung implementasi Tata Kelola di Deputy III pada triwulan selanjutnya.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan II Tahun 2026, walaupun semua renaksi sudah dapat dilaksanakan, namun masih terdapat kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target tersebut, diantaranya:

1. Masih terdapat kekurangan jumlah dan kompetensi SDM yang mengelola isu tata kelola dalam unit kerja, sehingga pelaksanaan pembinaan dan evaluasi belum maksimal.
2. Masih terdapat beberapa pegawai yang belum memahami persyaratan kenaikan pangkat dan/atau jenjang, termasuk dalam memantau angka kredit secara mandiri.
3. Adanya dinamika perkembangan ekonomi nasional yang membutuhkan penugasan tambahan, sehingga perlu dilakukan penyesuaian penggunaan anggaran (revisi POK).

Berdasarkan kendala dan juga capaian kinerja pada Triwulan II Tahun 2026, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan pada periode selanjutnya agar target kinerja yang ditetapkan dapat dicapai, diantaranya:

1. Melanjutkan dan meningkatkan frekuensi *knowledge sharing* atau sosialisasi terkait implementasi tata kelola di Deputy Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital.
2. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Biro Umum dan SDM untuk memfasilitasi proses kenaikan pangkat atau jenjang jabatan, serta mengusulkan peserta diklat dan uji kompetensi.
3. Menyempurnakan bahan perencanaan anggaran yang lebih baik dan Mata Anggaran Kegiatan (MAK) untukantisipasi penugasan tambahan.

1.3.

Tingkat Efektivitas Perencanaan Deputy Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital

Latar Belakang

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, mengamanatkan untuk melakukan evaluasi kinerja anggaran. Hal ini untuk memastikan perencanaan anggaran sesuai dengan capaian *output* yang sudah ditetapkan dalam dokumen penganggaran.

Tingkat Efektivitas Perencanaan Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi merupakan ukuran yang menggambarkan efektivitas perencanaan unit kerja sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Pada prakteknya, Tingkat Efektivitas Perencanaan diukur dengan dengan pemenuhan bukti dukung pelaksanaan perencanaan di lingkungan Kedeputusan. Adapun dokumen data dukung yang dinilai mampu menggambarkan Tingkat Efektivitas Perencanaan yang baik harus memenuhi 2 (dua) aspek utama, yaitu (1) ketepatan waktu penyampaian laporan berdasarkan periode laporan tertentu (Triwulan III, II, I dan IV) dan tanggal penyampaian dokumen tersebut kepada unit pengampu (tertera pada ND yang diedarkan unit pengampu), (2) substansi laporan telah sesuai dengan standar atau format yang ditentukan oleh unit pengampu.

Ruang lingkup Tingkat Efektivitas Perencanaan diukur dari data dukung dokumen perencanaan meliputi dokumen:

1. Rencana Strategis (RENSTRA) Deputy, paling lambat harus disahkan 5 (lima) bulan setelah RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) disahkan. Adapun standar penyusunan mengacu pada Permen PPN/Kepala Bappenas tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga.
2. Rencana Kerja (RENJA), paling lambat harus selesai bulan juli waktu berjalan untuk digunakan pada tahun setelahnya. Adapun standar penyusunan mengikuti Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran.
3. Perjanjian Kinerja (PK), Manual IKU, Rencana Aksi, paling lambat harus ditetapkan pada akhir januari tahun berjalan. Adapun standar penyusunan dokumen ini mengacu pada PermenPAN-RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
4. TOR RAB, paling lambat harus selesai bulan juli waktu berjalan untuk digunakan pada tahun setelahnya. Adapun standar penyusunan mengikuti

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran.

5. Sasaran Kinerja Pegawai (SKP), paling lambat akhir februari. Adapun Permenpan 6 tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN).

Ruang lingkup Tingkat Efektivitas Perencanaan diukur dari data dukung dokumen perencanaan meliputi dokumen RENSTRA Deputy, RENJA, PK, Manual IKU, Rencana Aksi, TOR RAB, dan SKP.

Tingkat Efektivitas Perencanaan Deputy Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital dihitung berdasarkan seberapa banyak bukti dukung Perencanaan yang dihasilkan sesuai standar di lingkungan Deputy Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital dibandingkan dengan jumlah keseluruhan bukti dukung yang telah dihasilkan. Berikut merupakan formulasi dalam menentukan Tingkat Efektivitas Perencanaan Deputy Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital:

$$\text{Tingkat Efektivitas Perencanaan} = \frac{\text{Total Bukti Dukung Perencanaan yang dihasilkan sesuai standar}}{\text{Total Bukti Dukung Perencanaan yang dihasilkan}} \times 100\%$$

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja IKU 1.3 Tingkat Efektivitas Perencanaan Deputy Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital Tahun 2026 adalah sebesar 100%. Target tersebut dihitung berdasarkan total bukti dukung Perencanaan yang dihasilkan sesuai standar dibagi dengan total bukti dukung yang seharusnya dihasilkan pada rentang waktu tertentu. Adapun target Triwulan II 2026 adalah sebesar 50% dengan output berupa dokumen TOR dan RAB.

Pada Triwulan II 2026, realisasi Tingkat Efektivitas Perencanaan Deputy Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital sebesar 50% (realisasi 100% dari target 50%) dan realisasi tahunan juga sebesar 50% yang dihitung berdasarkan target total bukti dukung 6 dokumen, dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target TW II 2026	Realisasi TW II 2026	Realisasi Tahunan*	% Kinerja
IKU 1.3. Tingkat Efektivitas Perencanaan Deputy Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital	Persentase	50%	50%	50%	100% (Memuaskan)

*) Realisasi Tahunan merupakan kumulatif realisasi pada Triwulan II, II Tahun 2026

Dokumen bukti dukung Tingkat Efektivitas Perencanaan Deputy Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital yang telah dihasilkan sesuai standar pada Triwulan II tahun 2026, yaitu dokumen TOR dan RAB (6 dokumen).

Pelaksanaan Rencana Aksi TW II dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi Triwulan II tahun 2026

sebagai berikut:

IKU 1.3. Tingkat Efektivitas Perencanaan Deputy Bidang Koordinasi Pertiagaan dan Ekonomi Digital			
No	Rencana Aksi TW II	Status	Keterangan
1	Monitoring Penyerapan Anggaran terhadap Pagu DIPA	Terlaksana	Monitoring Penyerapan Anggaran terhadap Pagu DIPA pada Triwulan II telah terlaksana melalui: - Rapat Pembahasan Kebijakan Penajaman Anggaran TA 2026 yang diselenggarakan pada tanggal 13 April 2026 di Ruang Rapat Biro MKKS sesuai Surat Undangan Biro MKKS No. PR.02.01/42/SET.M.EKON.1/04/2026 tanggal 10 April 2026. - Dialog Kinerja Internal di Lingkungan Deputy III yang membahas Update Penyerapan Anggaran Deputy III yang diselenggarakan secara daring pada tanggal 17 April 2026 sesuai Surat Undangan Setdep No. PW.03.03/175/D.III.M.EKON.1/04/2026 tanggal 14 April 2026.
2	Monitoring Target Capaian Output	Terlaksana	Monitoring Target Capaian Output telah terlaksana melalui: Rapat Koordinasi di lingkungan Deputy III yang membahas upaya penguatan tata kelola pelaksanaan anggaran TA 2026 pada tanggal 8 Mei 2026 sesuai Surat Undangan Setdep No. PW.03.03/231/D.III.M.EKON.1/05/2026 tanggal 7 Mei 2026.
3	Monitoring Revisi Anggaran dan/atau POK	Terlaksana	Monitoring Revisi Anggaran dan/atau POK telah terlaksana melalui: - Menyampaikan Revisi Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Bulan April 2026 berdasarkan ND Setdep ke Biro MKKS No. PR.04.01/214/D.III.M.EKON.1/04/2026 tanggal 28 April 2026. - Menyampaikan Revisi Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Bulan Mei 2026 berdasarkan ND Setdep ke Biro MKKS No. PR.04.01/262/D.III.M.EKON.1/06/2026 tanggal 2 Juni 2026.

4	Penyusunan Rancangan TOR dan RAB TA 2026	Terlaksana	Penyusunan Rancangan TOR dan RAB TA 2026 telah terlaksana melalui: Dialog Kinerja Internal di Lingkungan Deputy III yang membahas Update Penyerapan Anggaran Deputy III yang diselenggarakan secara daring pada tanggal 17 April 2026 sesuai Surat Undangan Setdep No. PW.03.03/175/D.III.M.EKON.1/04 /2026 tanggal 14 April 2026.
---	--	------------	--

Selain itu, upaya lainnya untuk menunjang IKU ini Sekretariat Deputy III telah berpartisipasi dalam kegiatan:

1. Menyelenggarakan Dialog Kinerja di lingkungan Deputy III pada tanggal 4 Juni 2026 dalam rangka penyusunan Pagu Indikatif TA 2027 sesuai Surat Undangan Setdep No. PR.02.01/267/D.III.M.EKON.1/06/2026 pada tanggal 3 Juni 2026.
2. Menyampaikan Masukan Bahan Rapat Kerja Menko Perekonomian bersama Badan Anggaran DPR RI terkait Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-K/L) TA 2027 sesuai ND Biro MKKS No. PR.02.01/158/SET.M.EKON.1/06/2026 tanggal Juni 2026.
3. Menyampaikan usulan Anggaran Belanja Tambahan TA 2027 sesuai ND Biro MKKS No. PR.02.01/168/SET.M.EKON.1/06/2026 tanggal 22 Juni 2026.

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang Triwulan II tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya, seperti menggunakan dokumen digital dan memanfaatkan aplikasi SRIKANDI dalam melakukan persuratan, rapat koordinasi melalui *video conference*, rapat koordinasi secara hybrid menggunakan fasilitas kantor. Jumlah efisiensi dari pengadaan rapat koordinasi melalui video conference tersebut diperkirakan mencapai Rp41.400.000 melalui penghematan biaya paket meeting di hotel. Hasil efisiensi tersebut dapat dialokasikan untuk kegiatan lain mendukung implementasi perencanaan di Deputy III pada triwulan selanjutnya.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Pelaksanaan IKU 1.3 Tingkat Efektivitas Perencanaan pada Triwulan II Tahun 2026 secara umum telah berjalan sesuai target. Namun demikian, terdapat beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian dalam proses penyusunan dokumen perencanaan, diantaranya:

1. Dinamika kebijakan dan kebutuhan penyesuaian prioritas program mengharuskan dilakukannya pembaruan terhadap substansi kegiatan, termasuk penyesuaian target output dan alokasi anggaran pada beberapa kegiatan.
2. Proses harmonisasi usulan dari seluruh unit kerja memerlukan koordinasi yang intensif agar TOR dan RAB yang disusun tetap selaras dengan arah kebijakan nasional, pagu anggaran yang tersedia, serta ketentuan perencanaan dan penganggaran yang berlaku.
3. Kebutuhan penyempurnaan data dukung dan sinkronisasi jadwal dengan unit pengelola anggaran turut menjadi tantangan dalam menjaga ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan.

Sebagai tindak lanjut atas tantangan tersebut, Sekretariat Deputy Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital terus memperkuat mekanisme pengendalian dan

koordinasi perencanaan melalui:

1. Pelaksanaan monitoring penyerapan anggaran, monitoring capaian output, serta monitoring revisi anggaran dan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) secara berkala. Dialog Kinerja Internal juga dimanfaatkan sebagai forum evaluasi untuk memastikan kesesuaian antara pelaksanaan kegiatan, target kinerja, dan kebutuhan anggaran.
2. Koordinasi dengan Biro MKKS dan unit teknis terus diintensifkan dalam penyusunan TOR dan RAB, penyusunan Pagu Indikatif TA 2027, penyampaian masukan RKA-K/L, serta usulan anggaran belanja tambahan sehingga proses perencanaan dapat lebih adaptif terhadap perubahan kebijakan.
3. Penerapan dokumen digital dan optimalisasi aplikasi SRIKANDI terus didorong guna meningkatkan efisiensi administrasi, mempercepat proses review dokumen, serta memperkuat akuntabilitas penyelenggaraan perencanaan.

1.4. Tingkat Ketaatan Pelaporan Deputy Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital

Latar Belakang

Ketaatan pelaporan adalah kemampuan dan komitmen seluruh unit eselon I (Kedeputian) untuk secara konsisten memenuhi ketentuan pelaporan resmi, baik yang bersifat internal maupun eksternal sesuai peraturan perundang-undangan dan pedoman tata kelola yang berlaku. Ketaatan pelaporan ini merupakan bagian dari sistem pengendalian dan akuntabilitas kinerja kementerian. Tujuan dari ketaatan pelaporan ini untuk menjaga kepatuhan terhadap regulasi, meningkatkan integritas, akuntabilitas, dan kepercayaan publik.

Ketaatan Pelaporan Deputy Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital merupakan ukuran yang menggambarkan sejauh mana unit kerja dapat memenuhi kewajiban penyampaian laporan nya secara tepat waktu, lengkap dan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Ketaatan ini dinilai berdasarkan 2 (dua) aspek utama, yaitu (1) ketepatan waktu penyampaian laporan berdasarkan periode laporan tertentu (Triwulan III, II, I dan IV) dan tanggal penyampaian dokumen tersebut kepada unit pengampu (tertera pada ND yang diedarkan unit pengampu), (2) substansi laporan telah sesuai dengan standar atau format yang ditentukan oleh unit pengampu. Adapun standar laporan yang diacu adalah Peraturan Menpan RB nomor 88 tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan serta Permenpan 6 tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN).

Adapun ruang lingkup laporan yang termasuk pada indikator ini adalah sebagai berikut :

1. Laporan Kinerja Triwulan II s.d IV (10 hari kerja setelah triwulan berakhir);
2. E-Monev (2 hari kerja pada tiap bulan);
3. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (akhir februari pada tahun berjalan); dan
4. Laporan SKP Triwulan II s.d IV (minggu terakhir pada bulan ke 4,7,10 dan 12).

Adapun formula perhitungan indikator Tingkat Ketaatan pelaporan adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Total laporan yang memenuhi standar ketaatan}}{\text{Total laporan yang disusun}} \times 100\%$$

Hasil Pengukuran Kinerja

Inisiatif Strategis Tingkat Ketaatan Pelaporan Deputy Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital yaitu terwujudnya kepatuhan pelaporan di unit

Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital. Komponen-komponen utama ketaatan pelaporan yaitu: (i) Menyiapkan Bahan Publikasi Media; (ii) Pelaporan Capaian Kinerja Individu Triwulan II; (iii) Pelaporan E-Monev; dan (iv) Penyusunan Laporan Narasi Kinerja Triwulan II.

Target kinerja Tingkat Ketaatan Pelaporan Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital Tahun 2026 adalah sebesar 100%. Target tersebut dihitung berdasarkan total laporan yang memenuhi standar ketaatan dibagi dengan total laporan yang seharusnya disusun pada rentang waktu tertentu.

Realisasi tingkat Ketaatan Pelaporan Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital pada Triwulan II sebesar 50%, mencapai 100% dari target Triwulan II Tahun 2026 yaitu 50%. Target total bukti dukung Tingkat Ketaatan Pelaporan yang dihasilkan pada tahun 2026 sesuai standar sebanyak 3 dokumen, dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target TW II 2026	Realisasi TW II Tahun 2026	Realisasi Tahunan*	% Kinerja
IKU 1.4. Tingkat Ketaatan Pelaporan Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital	Persentase	50%	50%	50%	100% (Memuaskan)

*) Realisasi Tahunan merupakan kumulatif realisasi pada Triwulan II, II, Tahun 2026

Dokumen bukti dukung Tingkat Ketaatan Pelaporan Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital yang telah dihasilkan sesuai standar pada Triwulan II tahun 2026 antara lain:

1. Menyiapkan Bahan Publikasi Media (1 Dokumen)
2. Pelaporan Capaian Kinerja Individu Triwulan II (1 Dokumen)
3. E-Monev (1 Dokumen)
4. Laporan Kinerja Triwulan II (1 Dokumen)

Pelaksanaan Rencana Aksi Triwulan dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi Triwulan II tahun 2026 sebagai berikut:

1.4. Tingkat Ketaatan Pelaporan Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital			
No	Rencana Aksi TW II	Status	Keterangan
1	Menyiapkan Bahan Publikasi Media Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital	Terlaksana	Bahan publikasi pada Triwulan I ini telah terlaksana melalui release berita melalui Website Resmi Kemenko Perekonomian, diantaranya: 1. Kemenko Perekonomian Dukung Penyelenggaraan ALFI CONVEX 2026 untuk Perkuat Transformasi

			dan Efisiensi Sistem Logistik Nasional (14 April 2026). 2. Kemenko Perekonomian Gelar Forum Nasional "Indonesia Digital Leap": Akselerasi Ekosistem Data Center, AI & Keamanan Siber untuk Pertumbuhan Ekonomi 8% (20 Mei 2026). 3. Buka Pelatihan Semikonduktor untuk Talenta Indonesia, Menko Airlangga: Kolaborasi Teknologi Arm Dorong Akselerasi Industri Semikonduktor Terintegrasi (20 Mei 2026). 4. Penguatan Kebijakan DHE SDA dan Tata Kelola Ekspor untuk Memperkuat Ekonomi Dalam Negeri (22 Mei 2026). 5. Perkuat Konsumsi Domestik, Pemerintah Dukung Program BINA Holiday & Back to School 2026 (8 Juni 2026). 6. Indonesia Pelajari Strategi Transformasi Ekonomi Tiongkok dan Penguatan Kerja Sama TCTP untuk Mendorong Investasi Berkualitas (30 Juni 2026).
2	Pelaporan capaian kinerja individu (SKP) Triwulan II	Terlaksana	Renaksi Sasaran Kinerja Pegawai Triwulan II telah terlaksana melalui dokumentasi kegiatan: - ND Kepala Biro Umum dan SDM No. KP.08.01/28/SET.M.EKON.4/01/2026 tanggal 8 Januari 2026 hal Penilaian Kinerja ASN Tahun 2025 dan Penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) Tahun 2026. - Deputi III telah mengumpulkan bukti dukung berupa SKP yang dicreate melalui aplikasi E-kinerja pada tautan berikut: https://tinyurl.com/SKPD3Tahun2026-Signed. - Selain itu, menindaklanjuti ND Biro Umum dan SDM No. KP/116/SET.M.EKON.4/02/2026 tanggal 5 Februari 2026 hal Evaluasi Sementara Penilaian Kinerja ASN Tahun 2025, Deputi III telah memberikan arahan melalui disposisi No. 267 tanggal 9 Februari 2026 kepada seluruh unit kerja Es.II di lingkungan Deputi III.

3	Pelaporan E-Monev	Terlaksana	Pengisian Aplikasi E-Monev Triwulan IIV T.A 2025 telah dilaksanakan melalui tindak lanjut ND Biro MKKS No. AK.03.01/120/SET.M.EKON.1/04/2026 tanggal 16 April 2026 hal Informasi Pelaporan Capaian Triwulan II TA 2025 pada Aplikasi E-Monev.
5	Penyusunan laporan capaian kinerja Triwulan II	Terlaksana	Penyusunan Laporan Kinerja Triwulan II telah terlaksana melalui dokumentasi/kegiatan sebagai berikut: - ND Biro MKKS No. AK.03.01/170/SET.M.EKON.1/06/2026 tanggal 18 Juni 2026 hal Permintaan Penyusunan Narasi Kinerja Triwulan I dan II TA 2026. - ND Setdep ke Keasdepan D3 No. AK.03.01/310/D.III.M.EKON.1/06/2026 tanggal 23 Juni 2026 hal Penyusunan Narasi Kinerja Triwulan I – II Tahun 2026. - ND Setdep ke Keasdepan D3 No. AK.02.02/330/D.III.M.EKON.1/06/2026 tanggal 29 Juni 2026 hal Pelaksanaan Survei Kepuasan Layanan Asisten Deputi di Lingkup Deputi III Semester 1 Tahun 2026. - ND Setdep ke Keasdepan D3 No. AK.02.02/337/D.III.M.EKON.1/07/2026 tanggal 1 Juli 2026 hal Pelaksanaan Survei Kepuasan Layanan Sekretariat Deputi di Lingkup Deputi III Semester 1 Tahun 2026.

Selain itu, upaya lainnya untuk menunjang IKU ini Sekretariat Deputi III telah berpartisipasi dalam kegiatan:

1. Melaksanakan Rapat Penyusunan Penilaian Kinerja Organisasi (PKO) di lingkungan Deputi III Tahun 2025 sesuai Surat Undangan Sekretariat Deputi No. AK.02.02/218/D.III.M.EKON.1/04/2026 tanggal 4 Mei 2026 di Ruang Rapat Biro Umum 4 Lt.6 Gedung Pos Ibukota, turut mengundang Inspektorat dan Biro MKKS.
2. Menyampaikan Tindak Lanjut Rapat Pembahasan PKO Deputi III Tahun 2025 melalui ND Sekretariat Deputi kepada Keasdepan No. AK.02.02/223/D.III.M.EKON.1/05/2026 tanggal 5 Mei 2026.
3. Menetapkan SK Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital No. 12 Tahun 2026 tentang Tim Penilai Kinerja Organisasi di Lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital.

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang Triwulan II tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya, seperti menggunakan dokumen digital dan memanfaatkan aplikasi SRIKANDI dalam melakukan persuratan, rapat koordinasi melalui *video conference*, rapat koordinasi secara hybrid menggunakan fasilitas kantor. Jumlah efisiensi dari pengadaan rapat koordinasi melalui video conference tersebut diperkirakan mencapai Rp41.400.000 melalui penghematan biaya paket meeting di hotel. Hasil efisiensi tersebut dapat

dialokasikan untuk kegiatan lain mendukung implementasi pelaporan di Deputi III pada triwulan selanjutnya.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan II Tahun 2026, walaupun semua renaksi sudah dapat dilaksanakan, namun terdapat kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan, diantaranya:

1. Koordinasi lintas bidang dalam pemenuhan data dukung belum sepenuhnya berjalan secara seragam, sehingga proses konsolidasi data masih memerlukan waktu yang lebih panjang untuk memastikan kelengkapan dan kesesuaian informasi.
2. Dinamika kebutuhan pelaporan dari unit kerja pembina, baik berupa penyesuaian format maupun tambahan substansi laporan, menuntut adanya penyesuaian yang cepat dari seluruh pihak yang terlibat sehingga berpotensi memengaruhi ketepatan waktu penyampaian laporan.
3. Pengelolaan dokumen dan data pendukung masih tersebar pada masing-masing unit kerja, sehingga proses penelusuran, verifikasi, dan penyelarasan informasi memerlukan koordinasi yang lebih intensif.

Berdasarkan kendala tersebut, maka dilakukan beberapa upaya/rekomendasi sebagai berikut:

1. Meningkatkan intensitas koordinasi dan komunikasi dengan seluruh PIC pada masing-masing unit kerja melalui rapat koordinasi maupun media komunikasi internal untuk memastikan pemenuhan data dukung sesuai jadwal yang ditetapkan.
2. Menyusun pedoman dan template pelaporan yang lebih terstandarisasi serta melakukan penyesuaian secara berkala terhadap perubahan kebijakan atau kebutuhan pelaporan dari unit kerja pembina.
3. Mengembangkan mekanisme pengelolaan dokumen secara terpusat melalui media penyimpanan berbasis daring (*cloud storage*) yang dilengkapi dengan klasifikasi dokumen dan pengaturan hak akses sehingga proses pengumpulan, pembaruan, dan penelusuran data dapat dilakukan secara lebih efektif dan efisien.

1.5. Persentase Penyelesaian Isu Strategis yang Diberikan oleh Deputi

Latar Belakang

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 15 tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengamanatkan Sekretaris Deputi untuk dapat menjalankan penugasan lain yang diberikan oleh Deputi. Penugasan ini dapat bersifat tata kelola dan substantif yang bersifat lintas keasdepan. Khusus untuk penugasan yang bersifat substantif, Sekretaris Deputi bertanggung jawab untuk melaksanakan sinkronisasi, koordinasi dan pengendalian terhadap isu-isu strategis yang menjadi fokus kedeputan.

Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital pada tahun ini mengawal isu – isu strategis kedeputan yang meliputi :

1. Koordinasi kebijakan peningkatan belanja dalam negeri, dikerjakan bersama Asdep Perdagangan Dalam Negeri, Perlindungan Konsumen, dan Tertib Niaga;
2. Koordinasi kebijakan terhadap hambatan ekspor/impor, dikerjakan bersama Asdep Fasilitas Perdagangan dan Pengembangan Ekspor;
3. Koordinasi penguatan kolaborasi pengelola jasa logistik, dikerjakan bersama Asdep Pengembangan Logistik;

4. Koordinasi penyusunan dashboard logistik nasional, dikerjakan bersama Asdep Pengembangan Logistik;
5. Koordinasi dan fasilitasi pengembangan data analitik, dikerjakan bersama Asdep Pengembangan Ekonomi Digital;
6. Koordinasi kebijakan penyusunan paket regulasi, dikerjakan bersama Asdep Pengembangan Logistik dan Asdep Peningkatan Inklusi Keuangan.

Adapun kriteria isu-isu strategis selesai apabila : (1) Isu Strategis telah ditindaklanjuti oleh Pihak terkait; (2) Hasil penyelesaian telah dikonfirmasi oleh Kedeputan; dan (3) Dokumen penyelesaian dari isu – isu strategis tersedia serta terverifikasi.

Rumus yang digunakan untuk menghitung persentase penyelesaian isu-isu strategis adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Total Isu – Isu Strategis yang Diselesaikan}}{\text{Total Isu Strategis yang ditetapkan}} \times 100\%$$

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja Persentase Penyelesaian Isu Strategis yang Diberikan oleh Deputy Tahun 2026 adalah sebesar 100%. Target tersebut dihitung berdasarkan total isu-isu strategis yang diselesaikan dibagi dengan total isu strategis yang ditetapkan pada rentang waktu tertentu.

Adapun target Triwulan II 2026 adalah sebesar 50% dengan realisasi persentase Penyelesaian Isu Strategis yang Diberikan oleh Deputy 50% atau sebesar 100% dari target Triwulan II Tahun 2026. Ringkasan dapat dilihat pada tabel berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target TW II 2026	Realisasi TW II 2026	Realisasi Tahunan*	% Kinerja
IKU 1.5. Persentase Penyelesaian Isu Strategis yang Diberikan oleh Deputy	Persentase	50%	50%	50%	100% (Memuaskan)

*) Realisasi Tahunan merupakan kumulatif realisasi pada Triwulan II, II Tahun 2026

Isu-isu strategis yang diberikan oleh Deputy pada Triwulan II Tahun 2026 diantaranya terkait dengan:

1. Koordinasi kebijakan peningkatan belanja dalam negeri, dikerjakan bersama Asdep Perdagangan Dalam Negeri, Perlindungan Konsumen, dan Tertib Niaga (PDNPKTN);
2. Koordinasi kebijakan terhadap hambatan ekspor/impor, dikerjakan bersama Asdep Fasilitasi Perdagangan dan Pengembangan Ekspor;
3. Koordinasi penguatan kolaborasi pengelola jasa logistik, dikerjakan bersama Asdep Pengembangan Logistik;
4. Koordinasi penyusunan dashboard logistik nasional, dikerjakan bersama Asdep Pengembangan Logistik;
5. Koordinasi dan fasilitasi pengembangan data analitik, dikerjakan bersama Asdep Pengembangan Ekonomi Digital;
6. Koordinasi kebijakan penyusunan paket regulasi, dikerjakan bersama Asdep Pengembangan Logistik dan Asdep Peningkatan Inklusi Keuangan.

Dalam pelaksanaannya, Sekretariat Deputy membagi penugasan pegawai Jabatan Fungsional Analis Kebijakan (JFAK) pada masing-masing unit kerja eselon 2 Keasdepan di lingkungan Deputy Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital sesuai Surat

Perintah Penugasan Sekretaris Deputy Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital Nomor PH.02.04/01/D.III.M.EKON.1/01/2025 tanggal 2 Januari 2025 yang telah diubah menjadi Surat Perintah Penugasan Sekretaris Deputy Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital Nomor PH.02.04/441/D.III.M.EKON.1/10/2025 tanggal 6 Oktober 2025 sehingga semua isu strategis dapat terpantau dan membantu mempermudah koordinasi internal.

Pelaksanaan Rencana Aksi TW II dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi Triwulan II tahun 2026 sebagai berikut:

1.5. Persentase Penyelesaian Isu Strategis yang Diberikan oleh Deputy			
No	Rencana Aksi TW II	Status	Keterangan
1	Persiapan Koordinasi isu strategis di Bidang Perniagaan dan Ekonomi Digital	Terlaksana	Tindak lanjut monitoring dan evaluasi isu strategis bidang PDNPKTN: 1. Permohonan Audiensi Ketua Badan Ekonomi Kreatif – KADIN Bekasi sesuai Disposisi No. 1171 tanggal 29 Juni 2026. 2. Partisipasi Kepesertaan Kegiatan Indoensia Cooperative Summit-Bursa Koperasi Indonesia 2026 sesuai Disposisi No. 1178 tanggal 30 Juni 2026. 3. Permohonan Memberikan Pidato Kunci dan Penekanan Tombol Pembol Pembukaan Pasar Modal IPO \$JELI, tanggal 7 Juli 2026 sesuai Disposisi No. 1192 tanggal 3 Juli 2026. 4. Laporan Menghadiri Official Paper Launch “Health, Nutrition & Lifestyles in ASEAN” sesuai ND No. PED.02.02/11/D.III.M.EKON.1.1/07/2026 tanggal 1 Juli 2026. 5. Laporan Menghadiri Kegiatan Seminar Penguatan Kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dalam Pengadaan Hulu Migas: Sinkronisasi, Kepastian, dan Daya Saing Industri Nasional sesuai ND No. ESD.01.01/10/D.III.M.EKON.1.1/06/2026 tanggal 30 Juni 2026. 6. Laporan Rapat Koordinasi Pendataan Sensus Ekonomi 2026 sesuai ND No. PR.05.01/5/D.III.M.EKON.1.2/06/2026 tanggal 26 Juni 2026. 7. Undangan menjadi Keynote Speaker pada The People's Choice 2026 by Golden Property Awards, tanggal 10 Agustus 2026 sesuai Disposisi No. 1027 tanggal 11 Juni 2026. Tindak lanjut monitoring dan evaluasi isu strategis bidang Fasilitasi Perdagangan dan

			Pengembangan Ekspor: 1. Laporan Rangkaian Kunjuangan Delegasi Kemenko Perekonomian dan Seminar Training "Two Countries Twin Parks" sesuai Disposisi No. 1070 tanggal 15 Juni 2026. 2. Permohonan Dukungan dan Fasilitasi Kunjugan Delegasi Fujian Provincial Department of Commerce (Provinsi Fujian, Tiongkok) ke Indonesia pada 20-23 Juli 2026, sesuai Disposisi No. 1184 tanggal 30 Juni 2026. 3. Pengajuan Kerja Sama dan Pengembangan Riset Center for Environmental, Social and Governance Studies, sesuai Disposisi No. 1175 tanggal 30 Juni 2026. 4. Mempelajari/Menanggapi Disposisi No. 1158 tanggal 29 Juni 2026 hal Kenaikan Harga Gas Industri. 5. Menindaklanjuti Disposisi No. 1141 tanggal 25 Juni 2026 hal Laporan Fasilitas Misi Bisnis APINDO ke Paris, 17-18 Juni 2026. 6. Menindaklanjuti Disposisi No. 1138 tanggal 24 Juni 2026 hal Penyampaian Daftar Komoditas yang Impornya Memerlukan Pertimbangan Teknis dari Kemenperin. 7. Mempelajari/Menanggapi Disposisi No. 1205 tanggal 6 Juli 2026 hal Agreement in Principle on the Allocation of EU Steel Tariff Rate Quotas for Indonesia under Article XXVIII GATT. 8. Menindaklanjuti Disposisi No. 1189 tanggal 11 Juli 2026 hal Permohonan Dukungan Tarif Bea Masuk 0% atas Impor Bahan Baku Plastik. 9. Laporan Tindak Lanjut Perkembangan Kebijakan Harga Bumi Gas Tertentu (HGBT) sesuai Disposisi No. 1180 tanggal 30 Juni 2026. 10. Menjadwalkan No. Disposisi 1115 tanggal 23 Juni 2026 hal Permohonan Audiensi dengan Menko Perekonomian. 11. Informasi terkait Mekanisme Transisi Implementasi Quality Control Orders (QCD) India melalui Transition Facilitation (Quality Control) Order 2026, sesuai Disposisi No. 1201 tanggal 6 Juli 2026. 12. Telaah Potensi Kerja Sama Semikonduktor Indonesia dengan Swedia dan Latvia sesuai Disposisi No. 1121 tanggal 23 Juni 2026. 13. Analisa Awal Relevansi Kebijakan Devisa Hasil Ekspor SDA dan Pembentukan PT Danantara Sumber Daya Indonesia terhadap Ketentuan WTO mengenai State Trading Enterprises (STE), sesuai Disposisi No. 1122 tanggal 23 Juni 2026.
--	--	--	--

			14. Persepsi Perusahaan Swedia akan Iklim Berusaha Global dan Indonesia Tahun 2026, sesuai Disposisi No. 1109 tanggal 23 Juni 2026. 15. Laporan Pelaksanaan Misi Dagang di Shanghai, RRT, dan Rangkaian Pertemuan Tk Menteri Perdagangan APEC di Suzhou, RRT sesuai Disposisi No. 1216 tanggal 8 Juli 2026. 16. Permohonan Pengecualian Kewajiban Retensi Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DSE-SDA) bagi Industri Pengalengan Ikan, sesuai Disposisi No. 1085 tanggal 18 Juni 2026. 17. Invitation for Indonesia's Participation in the 2026 'Silk Road E-Commerce for the World' Themed Activities sesuai Disposisi No. 1079 tanggal 17 Juni 2026. 18. Tanggapan dan Usulan Maxim Indonesia mengenai Rancangan Peraturan Presiden No 27 Tahun 2026 sesuai Disposisi No. 1720 tanggal 15 Juni 2026.
			Tindak lanjut monitoring dan evaluasi isu strategis bidang Pengembangan Logistik Nasional: 1. Menghadiri Digital Ecosystem Alignment (DEAL) 2026, tanggal 23 Juni 2026 sesuai Disposisi No. 1082 tanggal 18 Juni 2026 dan Surat Dirjen Ekonomi Digital Komdigi No. B-805/JED/PR.01.01/06/2026 tanggal 5 Hybu 2926. 2. Surat Deputy Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital No. B/PI.03/322/D.III.M.EKON/06/2025 tanggal 3 Juni 2026 hal Dukungan Penyelenggaraan ALFI CONFEX 2026. 3. Permohonan Publikasi Audiensi antara Kemenko Perekonomian bersama ALFI pada tanggal 9 April 2026 sesuai ND Sekretariat Deputy kepada Biro KLIP No. HM.02.01/166/D.III.M.EKON.1/04/2026 tanggal 10 April 2026. 4. Peliputan Kick Off ALFI Convex 2026 dengan Menko Perekonomian, 9 April 2026 Pkl. 14.00-15.00 WIB, sesuai ND Sekretariat Deputy ke Biro KLIP No. PED.03.01/159/D.III.M.EKON.1/04/2026 tanggal 8 April 2026.
			Tindak lanjut monitoring dan evaluasi isu strategis bidang Pengembangan Ekonomi Digital: 1. Menghadiri Digital Ecosystem Alignment (DEAL) 2026, tanggal 23 Juni 2026 sesuai Disposisi No. 1082 tanggal 18 Juni 2026 dan Surat Dirjen Ekonomi Digital Komdigi No. B-805/JED/PR.01.01/06/2026 tanggal 5 Hybu 2926. 2. Perkembangan mengenai Usulan

			Perluasan Kebijakan Bad Labs oleh Federal Communications Commission (FCC) terkait Pengakuan Laboratorium Pengujian dan Certification Bodies Negara Mitra, sesuai Disposisi No. 1112 tanggal 23 Juni 2026. 3. Tanggapan dan Usulan Maxim Indonesia mengenai Rancangan Peraturan Presiden No 27 Tahun 2026 sesuai Disposisi No. 1720 tanggal 15 Juni 2026. 4. Rapat Koordinasi Evaluasi Lanjutan Pembahasan Kerangka Konseptual dan Cakupan Sektor Aktivitas Ekonomi Digital sesuai Surat Undangan Asdep Ekonomi Digital No. PED.04.04/39/D.III.M.EKON.5/04/2026 tanggal 13 April 2026. 5. Menghadiri Rapat Umum Anggota I KORIKA sesuai Disposisi No. 698 tanggal 22 April 2026 dan Surat Undangan Korika No. 289/Und/KORIKA/IV/2026 tanggal 15 April 2026. 6. Menghadiri Agenda Rapat Tim Sinkronisasi Perencanaan Sistem Komunikasi Kabel Laut dan Data Center yang diselenggarakan pada tanggal 12 Mei 2026 sesuai Surat Undangan Dirjen Infrastruktur Digital Komdigi No. B-476/DJID.2/PI.04.01/05/2026 tanggal 5 Mei 2026. 7. Menghadiri Agenda Rapat Tim Sinkronisasi Perencanaan Sistem Komunikasi Kabel Laut dan Data Center yang diselenggarakan pada tanggal 19 Mei 2026 sesuai Surat Undangan Dirjen Infrastruktur Digital Komdigi No. B-510/DJID.2/PI.04.01/05/2026 tanggal 13 Mei 2026. 8. Menghadiri Agenda Rapat Tim Sinkronisasi Perencanaan Sistem Komunikasi Kabel Laut dan Data Center yang diselenggarakan pada tanggal 21 Mei 2026 sesuai Surat Undangan Dirjen Infrastruktur Digital Komdigi No. B-516/DJID.2/PI.04.01/05/2026 tanggal 18 Mei 2026. 9. Menghadiri Undangan Partisipasi dalam Agenda GARUDA AI National Summit 2026 sesuai Disposisi No. 898 tanggal 26 Mei 2026. 10. Menghadiri Rapat Pembahasan Penajaman Rencana Aksi RPerpres Percepatan Pengembangan Industri Gim Nasional pada tanggal 17 Juni 2026 berdasarkan Disposisi No. 1056 tanggal 15 Juni 2026 dan Surat Undangan Deputi Bidang Kreativitas Digital dan Teknologi Kementerian Ekonomi Kreatif No. UND/KD.001/18/D.3/2026 tanggal 14 Juni 2026.
--	--	--	--

			11. Menghadiri Soft-Launch of KORIKA Claw tanggal 17 Juni 2026 sesuai Disposisi No. 1015 tanggal 10 Juni 2026 dan Surat Undangan Ketua Umum KORIKA No. 305/Und/KORIKA/VI/2026 tanggal 9 Juni 2026. 12. Menghadiri Pembahasan Teknis dan Tata Tertib Pelaksanaan Digital Ecosystem Alignment/DEAL 2026 sesuai Surat Dirjen Ekosistem Digital Komdigi No. B-1853/DJED.1/PR.01.01/06/2026 tanggal 18 Juni 2026. 13. Menghadiri Invitation Forum AI and Impact on the Indonesian Labour Market pada tanggal 24 Juni 2026, sesuai Disposisi No. 1091 tanggal 18 Juni 2026 dan Surat Undangan Director ILO Country for Indonesia and Timur Leste No. Program/340 tanggal 15 Juni 2026.
			Tindak lanjut monitoring dan evaluasi isu strategis bidang Peningkatan Inklusi Keuangan: 1. Menindaklanjuti Disposisi No. 1024 tanggal 11 Juni 2026 hal Laporan Kunjungan Deputi 3 Kemenko Perekonomian telah melakukan Kunjungan di Bern, Swiss. 2. Menindaklanjuti Disposisi No. 1027 tanggal 11 Juni 2026 hal Undangan menjadi Keynote Speaker pada The People's Choice 2026 by Golden Property Awards, tanggal 10 Agustus 2026. 3. Menindaklanjuti Disposisi No. 966 tanggal 4 Juni 2026 hal Permohonan Audiensi Bidang EKSYAR Kedeputian II KSP dengan Kemenko Perekonomian RI, tanggal 10 Juni 2026. 4. Menindaklanjuti Undangan FGD Penyusunan Roadmap Pengembangan dan Penguatan Sustainable Finance di Bidang PVML, tanggal 27 April 2026 by zoom. 5. Menindaklanjuti Disposisi No. 625 tanggal 14 April 2026 hal Permohonan Dukungan Kegiatan Pekan Inovasi & Investasi Sumatera Utara (PIISU) ke-12 Tahun 2026, tanggal 10sd13 Juni 2026.

Selain itu, upaya lainnya untuk menunjang IKU ini Sekretariat Deputi III telah berpartisipasi dalam kegiatan:

1. Dalam rangka penyelesaian isu strategis yang diberikan oleh Deputi, Sekretaris Deputi juga diamanahi sebagai penanggungjawab Kelompok Kerja Percepatan Perdagangan Jasa dan Ekonomi Digital sesuai Surat Keputusan Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital Nomor 12 Tahun 2025 tentang Kelompok Kerja Optimalisasi Kinerja Bidang Perdagangan Jasa Sementara dalam Platform Ekonomi Digital (*Gig Economy*) dan Pengembangan *Artificial Intelligence* (AI) di Lingkungan Deputi Bidang Koordinasi dan Ekonomi Digital.

2. Turut berpartisipasi dalam agenda Rapat Finalisasi Substansi Laporan Evaluasi RKP Triwulan IV 2025 sesuai ND Biro MKKS No. AK.03.01/122/SET.M.EKON.1/04/2026 tanggal 20 April 2026.
3. Beberapa kegiatan tambahan dalam menunjang IKU ini, kami sampaikan melalui tautan berikut: <https://drive.google.com/drive/folders/1ZI84dYhueOTsfv3LTb7-lwgog1yAVnKq?usp=sharing>.

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang Triwulan II tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya, seperti menggunakan dokumen digital dan memanfaatkan aplikasi SRIKANDI dalam melakukan persuratan, rapat koordinasi melalui *video conference*, rapat koordinasi secara hybrid menggunakan fasilitas kantor. Jumlah efisiensi dari pengadaan rapat koordinasi melalui video conference tersebut diperkirakan mencapai Rp71.390.000 melalui penghematan biaya paket meeting di hotel. Hasil efisiensi tersebut dapat dialokasikan untuk kegiatan lain mendukung implementasi pelaporan di Deputy III pada triwulan selanjutnya.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan II Tahun 2026, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Berikut ini beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut:

1. Isu-isu strategis yang dikawal sebagian besar melibatkan berbagai kementerian/lembaga, asosiasi, pelaku usaha, dan pemangku kepentingan lainnya sehingga proses sinkronisasi kebijakan dan penyamaan substansi membutuhkan waktu serta koordinasi yang lebih intensif.
2. Dinamika perkembangan isu strategis yang sangat cepat, khususnya pada sektor perdagangan, logistik, dan ekonomi digital, mengharuskan unit kerja melakukan penyesuaian analisis serta penyusunan rekomendasi kebijakan secara cepat agar tetap relevan dengan kondisi terkini.
3. Sebagian tindak lanjut penyelesaian isu strategis bergantung pada keputusan atau kebijakan instansi lain, sehingga penyelesaian akhir suatu isu belum sepenuhnya dapat dikendalikan oleh Sekretariat Deputy dan memerlukan proses monitoring secara berkelanjutan.

Berdasarkan kendala tersebut, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi sebagai berikut:

1. Memperkuat koordinasi lintas unit kerja dan lintas kementerian/lembaga melalui rapat koordinasi, forum pembahasan, serta komunikasi intensif untuk mempercepat penyamaan persepsi dan tindak lanjut penyelesaian isu strategis.
2. Meningkatkan fungsi monitoring terhadap perkembangan setiap isu strategis melalui pemetaan status penyelesaian, identifikasi tindak lanjut, serta penyampaian laporan perkembangan secara berkala kepada pimpinan sebagai dasar pengambilan keputusan.
3. Mengoptimalkan peran Jabatan Fungsional Analis Kebijakan yang telah ditugaskan pada masing-masing keasdepan untuk melakukan pendampingan, analisis kebijakan, serta penyusunan rekomendasi yang berbasis data sehingga proses penyelesaian isu strategis dapat berlangsung lebih efektif dan tepat sasaran.

1.6. Persentase Pembangunan Zona Integritas Deputy Bidang Koordinasi

Latar Belakang

Zona Integritas yang selanjutnya disingkat ZI adalah instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya telah berkomitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima. Unit kerja melakukan pembangunan zona integritas yang nantinya akan

**Perniagaan
dan Ekonomi
Digital**

dievaluasi oleh Tim Penilai Internal (TPI). Komponen penilaian pembangunan ZI terdiri dari: (Komponen dan kriteria dapat berubah mengikuti peraturan yang berlaku)

1. Nilai Komponen Pengungkit ZI dengan kriteria nilai minimal 42,75
2. Nilai Komponen Hasil Survei Persepsi Anti Korupsi dengan kriteria nilai minimal 3,6
3. Nilai Komponen Hasil Subkomponen Hasil "Kinerja lebih baik" dengan kriteria nilai minimal 2,5
4. Nilai Komponen Hasil Survei Pelayanan Publik yang Prima dengan kriteria nilai minimal 3,2

Rumus yang digunakan untuk menghitung persentase pembangunan ZI Deputy Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital adalah sebagai berikut:

$$\left(\left(\frac{\text{Realisasi Komponen Penilaian 1}}{\text{Nilai Minimum Komponen Penilaian 1}} \right) + \dots + \left(\frac{\text{Realisasi Komponen Penilaian ke-n}}{\text{Nilai Minimum Komponen Penilaian ke-n}} \right) \right) \times 100\%$$

Jumlah Seluruh Komponen

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja Persentase Pembangunan ZI Deputy Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital Tahun 2026 adalah sebesar 87%. Target tersebut dihitung berdasarkan realisasi komponen penilaian 1 - 4 dibagi dengan nilai minimum komponen penilaian dibagi dengan jumlah seluruh komponen.

Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) terkait Nilai Pembangunan ZI Triwulan II Tahun 2026 masih mengacu pada hasil evaluasi Tahun 2025, mengingat Inspektorat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian masih dalam proses pelaksanaan evaluasi dan penyusunan Laporan Hasil Evaluasi Pembangunan ZI Tahun 2026.

Sesuai Nota Dinas Inspektorat Nomor PW.06.02/11/INS.M.EKON/01/2026 tanggal 14 Januari 2026 tentang Penyampaian Nilai Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan ZI untuk Mendukung Nilai IKU, Deputy Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital memperoleh nilai evaluasi ZI sebesar 75,13, yang dikonversikan menjadi Nilai IKU sebesar 101,93%, dimana capaian sebesar 110% dari target sebesar 87%. Nilai tersebut digunakan sebagai dasar perhitungan capaian IKU Triwulan I dan Triwulan II Tahun 2026 hingga hasil evaluasi Tahun 2026 diterbitkan oleh Inspektorat. Rincian sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target TW II 2026	Realisasi	% Kinerja
IKU 1.6. Persentase Pembangunan Zona Integritas Deputy Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital	Persentase	87%*	101,93% **	110% (Memuaskan)

*) Target kumulatif Tahun 2026

**) Realisasi Persentase Pembangunan Zona Integritas Deputy III Tahun 2025

Perhitungan capaian realisasi tersebut dilakukan oleh Tim Penilaian Internalan (TPI) Inspektorat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian berdasarkan rumus perhitungan LKE ZI yang terdiri dari area perubahan:

1. Manajemen Perubahan
2. Penataan Tatalaksana
3. Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur
4. Penguatan Akuntabilitas
5. Penguatan Pengawasan
6. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Pelaksanaan Rencana Aksi TW II dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi Triwulan II tahun 2026 sebagai berikut:

1.6. Persentase Pembangunan Zona Integritas Deputy Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital			
No	Rencana Aksi TW II	Status	Keterangan
1	Peningkatan Kapasitas SDM Mengenai Zona Integritas	Terlaksana	Peningkatan Kapasitas SDM Mengenai Zona Integritas Triwulan II terlaksana melalui: 1. Pelaksanaan Mini Mentoring Pegawai bertema “Financial Planning: Managing Cash Flow and Daily Finances” pada tanggal 8 Juni 2026 di RR Biro Umum 1 Lt.6 Gedung Pos Ibukota, sesuai Surat Undangan Sekretaris Deputy III No. RB.02/268/D.III.M.EKON.1/06/2026 tanggal 4 Juni 2026. 2. Rapat Finalisasi Agenda Sharing Session Akselerasi Reformasi Birokrasi: Penguatan Budaya Anti Korupsi dan Gratifikasi Serta Peran Agen Perubahan dalam Mendorong Kinerja Organisasi yang diselenggarakan secara daring pada tanggal 24 Juni 2026, sesuai Surat Undangan No. RB.02/316/D.III.M.EKON.1/06/2026 tanggal 23 Juni 2026. 3. Melaksanakan Sharing Session Akselerasi Reformasi Birokrasi: Penguatan Budaya Anti Korupsi dan Gratifikasi Serta Peran Agen Perubahan dalam Mendorong Kinerja Organisasi antara Pemerintah Kota Depok dan Deputy III pada tanggal 25 Juni 2026 sesuai Surat Undangan Sekretaris Deputy No. RB.02/315/D.III.M.EKON.1/06/2026 tanggal 23 Juni 2026.

Dalam rangka pelaksanaan rencana aksi Pembangunan Zona Integritas Triwulan II Tahun 2026, berdasarkan Nota Dinas Inspektorat No. PW.06.02/91/INS.M.EKON/05/2026 tanggal 12 Mei 2026 hal Pelaksanaan Survei Mandiri Evaluasi Pembangunan Zona Integritas Tahun 2026, Deputy III telah melaksanakan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) dan Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) melalui Surat Deputy Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital No. PW.06.02/57/D.III.M.EKON/05/2026 tanggal 11 Mei 2026 hal Permohonan Pengisian SPAK dan SPKP. Pengisian Survei melalui tautan:

- SPAK dan SPKP periode Februari Tahun 2026: <https://tinyurl.com/ZID3Feb26>
- SPAK dan SPKP periode Maret Tahun 2026: <https://tinyurl.com/ZID3Mar26>
- SPAK dan SPKP periode April Tahun 2026: <https://tinyurl.com/ZID3Apr26>
- SPAK dan SPKP periode Mei Tahun 2026: <https://tinyurl.com/ZID3Mei26>

Berdasarkan hasil Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) dan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) periode Februari sampai dengan Mei 2026, Deputy Bidang Koordinasi

Perniagaan dan Ekonomi Digital secara konsisten memperoleh kategori Sangat Baik pada kedua indeks. Nilai Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan (IPKP) berada pada rentang 93,33%–94,38%, sedangkan nilai Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) berada pada rentang 94,66%–95,44%. Capaian tersebut menunjukkan bahwa kualitas pelayanan yang diberikan kepada para pemangku kepentingan tetap terjaga pada tingkat yang sangat baik, sekaligus mencerminkan semakin kuatnya implementasi budaya integritas dan upaya pencegahan korupsi di lingkungan unit kerja. Konsistensi capaian ini menjadi indikator bahwa berbagai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik dan penguatan tata kelola organisasi telah berjalan secara efektif serta perlu terus dipertahankan dan ditingkatkan melalui perbaikan berkelanjutan. Rincian sebagai berikut:

- **Februari 2026**

IPKP sebesar **93,33%** (Sangat Baik) dan IPAK sebesar **95,00%** (Sangat Baik).

- **Maret 2026**

IPKP sebesar **93,88%** (Sangat Baik) dan IPAK sebesar **94,66%** (Sangat Baik).

- **April 2026**

IPKP sebesar **94,38%** (Sangat Baik) dan IPAK sebesar **95,44%** (Sangat Baik).

- **Mei 2026**

IPKP sebesar **93,84%** (Sangat Baik) dan IPAK sebesar **95,14%** (Sangat Baik).

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang Triwulan II tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya, seperti menggunakan dokumen digital dan memanfaatkan aplikasi SRIKANDI dalam melakukan persuratan, rapat koordinasi melalui *video conference*, rapat koordinasi secara hybrid menggunakan fasilitas kantor, serta penyebaran survey melalui formulir elektronik. Jumlah efisiensi dari pengadaan rapat koordinasi melalui video conference tersebut diperkirakan mencapai Rp20.550.000. Hasil efisiensi tersebut dapat dialokasikan untuk kegiatan lain mendukung implementasi pembangunan ZI di Deputy III pada triwulan selanjutnya.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan II Tahun 2026, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan, diantaranya:

1. Internalisasi nilai-nilai Zona Integritas dan budaya antikorupsi belum sepenuhnya merata pada seluruh pegawai, sehingga diperlukan penguatan secara berkelanjutan agar implementasi integritas tidak hanya bersifat administratif, tetapi menjadi bagian dari budaya kerja organisasi.
2. Pemenuhan eviden pada enam area perubahan masih memerlukan penyempurnaan secara berkesinambungan karena sebagian dokumen pendukung perlu diperbarui mengikuti perkembangan kebijakan, inovasi, dan pelaksanaan program kerja selama Tahun 2026.
3. Hasil evaluasi Pembangunan Zona Integritas Tahun 2026 dari Tim Penilai Internal (TPI) Inspektorat masih dalam proses, sehingga unit kerja belum memperoleh umpan balik (*feedback*) resmi sebagai dasar penyempurnaan terhadap area yang masih memerlukan peningkatan.

Berdasarkan kendala tersebut, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi sebagai berikut:

1. Meningkatkan internalisasi budaya integritas melalui pelaksanaan *sharing session*, mini mentoring, kampanye anti korupsi, serta penguatan peran Agen Perubahan sebagai role model dalam penerapan nilai-nilai BerAKHLAK dan Zona Integritas.
2. Melakukan reviu dan pemutakhiran eviden secara berkala pada seluruh area perubahan Zona Integritas agar dokumen pendukung selalu sesuai dengan kondisi terkini dan siap digunakan dalam proses evaluasi maupun monitoring internal.
3. Melaksanakan evaluasi mandiri (*self assessment*) terhadap pemenuhan indikator pembangunan Zona Integritas serta menindaklanjuti setiap masukan dari Inspektorat dan unit pembina sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas implementasi Reformasi Birokrasi.

**1.7. Indeks
Kepuasan Layanan
Sekretaris Deputy
Bidang Koordinasi
Perniagaan dan
Ekonomi Digital**

Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Menteri Perekonomian Nomor 15 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, sebagaimana tercantum dalam Pasal 90, Sekretaris Deputy mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program kegiatan, tata Kelola, dan dukungan administrasi di lingkungan Deputy Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital.

Layanan Sekretaris Deputy adalah layanan yang diberikan oleh Sekretaris Deputy kepada Kedeputian untuk melaksanakan tugas koordinasi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program kegiatan, tata kelola, dan dukungan administrasi di lingkungan Deputy Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital.

Sekretariat Deputy menyelenggarakan fungsi koordinasi dan pemberian dukungan dalam :

- A. Perencanaan, program dan anggaran;
- B. Pengelolaan kinerja dan pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
- C. Pengelolaan sistem pengendalian internal;
- D. Pengelolaan data dan sistem informasi;
- E. Pengelolaan penataan organisasi, tata laksana, dan SDM;
- F. Pengelolaan BMN;
- G. Penataan kearsipan dan persuratan;
- H. Pengelolaan hubungan masyarakat, keprotokolan, persidangan, dan penyiapan naskah pimpinan, dan administrasi;
- I. Pemantauan, analisis dan evaluasi pengelolaan keuangan;
- J. Pemantauan, evaluasi, dan laporan program kegiatan dan tata kelola; dan
- K. Pelaksanaan fungsi lainnya.

Indikator kepuasan layanan Sekretaris Deputy mengukur tentang tingkat kepuasan layanan koordinasi dan dukungan yang diberikan oleh Sesdep kepada Kedeputian sesuai dengan tugas dan fungsi dari Sekretaris Deputy. Penilaian terhadap layanan ini didasarkan pada 5 (lima) aspek kualitas pelayanan yaitu :

1. **Aspek Ketanggapan dalam layanan (*Responsiveness*)**
Menggambarkan kesiapan dan kecepatan unit kerja dalam merespons permintaan, keluhan atau kebutuhan layanan
2. **Aspek Keandalan dalam layanan (*Reability*)**
Mengukur sejauh mana layanan yang diberikan sesuai dengan prosedur atau standar layanan
3. **Aspek Sarana dan Prasarana Layanan (*Tangible*)**
Menilai ketersediaan dan kualitas fisik/fasilitas, serta tampilan lingkungan kerja yang mendukung layanan
4. **Aspek Kepastian dalam Layanan (*Assurance*)**
Mengukur kemampuan dan kompetensi petugas dalam memberikan layanan, serta tingkat kepercayaan dan rasa aman
5. **Aspek Sikap dalam Layanan (*Emphaty*)**
Menunjukkan perhatian dan kepedulian secara personal dan manusiawi pada layanan yang diberikan

Seluruh aspek kepuasan ini dirata – rata dan diukur ke dalam indeks kepuasan layanan yang terdiri dari 4 (empat) kategori penilaian yaitu :

1. Sangat Tidak Puas (1), rentang nilai <2.50
2. Tidak Puas (2), rentang nilai 2.51 s.d 3.00
3. Puas (3), rentang nilai 3.01 s.d 3.50
4. Sangat Puas (4), rentang nilai 3.51 s.d 4.00

Indikator Kinerja Utama Indeks kepuasan layanan Sekretariat Deputy diukur melalui Survei Kepuasan Layanan Internal di Lingkungan Deputy Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital. Daftar pertanyaan survei terdiri dari

beberapa pertanyaan berupa 5 (lima) jenis aspek layanan yang telah diberikan oleh Sesdep kepada Deputi. Jumlah responden dipilih secara acak/random dan berasal dari unit Kerja Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital.

$$\text{Rumus Perhitungan :} \\ \frac{\sum \text{Rerata jawaban dari masing – masing item survei}}{\text{Jumlah Item Survei}}$$

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja Indeks Kepuasan Layanan Sekretaris Deputi adalah 3 dari 4 (Baik) pada Tahun 2026. Target tersebut dapat terealisasi apabila survei yang dilakukan kepada seluruh pejabat dan pegawai di Kedeputian Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital baik ASN baik PNS maupun PPPK di Unit Kerja Asisten Deputi Perdagangan Dalam Negeri, Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga, Asisten Deputi Fasilitas Perdagangan dan Pengembangan Ekspor, Asisten Deputi Pengembangan Logistik Nasional, Asisten Deputi Pengembangan Ekonomi Digital, dan Asisten Deputi Peningkatan Inklusi Keuangan memberikan penilaian hasil yang memuaskan. Penetapan target kinerja tersebut didasarkan pada hasil dialog kinerja dan arahan dari Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital.

Adapun Indeks Triwulan II 2026 capaian sebesar 3,33 atau mencapai 111% dari target Semester 1 Tahun 2026 sebesar 3 (dari 4). Ringkasan dapat dilihat pada tabel berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target TW II 2026	Realisasi*	% Kinerja*
IKU 1.7. Indeks Kepuasan Layanan Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital	Indeks	3 dari 4	3,33	110%

Indeks Kepuasan Layanan Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital Semester I Tahun 2026 sebesar **3,33** (naik dari Semester II Tahun 2025 sebesar 3,24). Pengukuran tersebut diperoleh berdasarkan hasil survei yang diikuti oleh 32 responden yang merupakan pengguna layanan di lingkungan Keasdepan. Nilai tersebut berada pada rentang 3,01–3,50 dengan kategori **"Puas"**, yang menunjukkan bahwa kualitas layanan Sekretariat Deputi secara umum telah memenuhi harapan pengguna layanan sepanjang Semester I Tahun 2026. Tautan Survei dapat diakses *pada: bit.ly/SurveiKepuasanSetdep3Sem1T2026*.

Pelaksanaan Rencana Aksi TW II dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025, pelaksanaan rencana aksi Triwulan II tahun 2026 sebagai berikut:

1.7. Indeks Kepuasan Layanan Sekretaris Deputy Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital			
No	Rencana Aksi TW II	Status	Keterangan
1	Penyusunan kuesioner pengukuran survei kepuasan layanan Sekretaris Deputy Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital	Terlaksana	Berdasarkan Nota Dinas Nomor AK.02.02/337/D.III.M.EKO N.1/07/2026 Tanggal 1 Juli 2026 hal Pengisian Survei Kepuasan Layanan Setdep Deputy III periode Semester 1 Tahun 2026, telah dilakukan proses penyusunan kuesioner dan persiapan pengukuran survei layanan kepuasan Sekretariat Deputy III.
2	Pelaksanaan survei kepuasan layanan Sekretaris Deputy Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital Triwulan II	Terlaksana	Pengisian survei pada tautan bit.ly/SurveiKepuasanSetdep3Sem1T2026

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang Triwulan II tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya, seperti menggunakan dokumen digital dan memanfaatkan aplikasi SRIKANDI dalam melakukan persuratan dan penyebaran survey melalui formulir elektronik. Jumlah efisiensi dari pengadaan rapat koordinasi melalui video conference tersebut diperkirakan mencapai Rp20.550.000. Hasil efisiensi tersebut dapat dialokasikan untuk kegiatan lain mendukung implementasi kepuasan layanan di Deputy III pada triwulan selanjutnya.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan I Tahun 2026, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan, diantaranya:

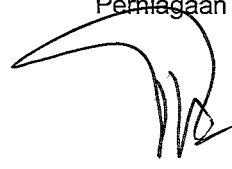
1. Meskipun target jumlah responden survei telah terpenuhi (32 responden dari target 30) dan Indeks Kepuasan Layanan mencapai nilai 3,33 dengan kategori "Puas", hasil survei tersebut masih memiliki ruang untuk ditingkatkan.
2. Jumlah responden yang relatif terbatas menyebabkan tingkat representativitas terhadap keseluruhan pengguna layanan belum optimal.

Berdasarkan kendala tersebut, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi sebagai berikut:

1. Sekretariat Deputy Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital akan memperluas cakupan responden survei dan melakukan sosialisasi intensif kepada seluruh pegawai di lingkungan Deputy III agar hasil pengukuran lebih representatif terhadap seluruh pengguna layanan.
2. Selain itu, akan dilakukan evaluasi berkala terhadap hasil survei untuk mengidentifikasi aspek layanan yang memperoleh penilaian relatif rendah sebagai dasar penyusunan rencana perbaikan.

Jakarta, 10 Juni 2026

Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi
Perniagaan dan Ekonomi Digital

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, sweeping initial 'P' followed by a series of vertical strokes and a final flourish.

Pujo Setio